

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah terjadi selama 17 tahun terakhir dengan intensitas kejadian yang semakin tinggi dan dampak yang semakin luas.<sup>1</sup> Faktor penyebab kebakaran hutan dapat terjadi karena faktor alam atau non-alam seperti kesengajaan oknum yang membuka lahan baru dengan cara membakar hutan, musim kemarau panjang, hingga kelalaian seseorang seperti membuang puntung rokok sembarangan. Luas karhutla tiap provinsi di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan jumlah kasus seperti pada tabel 1.1 berikut<sup>2</sup>:

**Tabel 1.1 Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 2015 – 2019**

No.	Tahun	Jumlah kasus (hektare)
1.	2015	2.593.435 ha
2.	2016	438.363,19 ha
3.	2017	165.483,92 ha
4.	2018	529.266,64 ha
5.	2019	1.649.258,00 ha

Sumber: [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas\\_kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran) diakses pada 9 September 2020

Kebakaran yang terjadi tahun 2019 merupakan yang terburuk sejak tahun 2015 yang membakar hutan dan lahan seluas 2,6 juta hektare. Penemuan yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Adrhian David, 2016, “Dinamika Peran dan Strategi LSM Dalam Arena Politik Lingkungan Hidup (Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan)”, (Bogor: Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor), hal 17.

<sup>2</sup> “Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2019”, sipongi.menlhk.go.id, diakses pada 9 September 2020 pukul 22.17 wib. [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas\\_kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran)

para ilmuwan *Center for International Forestry Research* (CIFOR), Sebanyak 76 persen pembakaran yang terjadi di lahan terlantar dimana tanah sebelumnya adalah lahan hutan yang mengalami pembakaran yang berulang. Sehingga mengubah menjadi semak belukar terdegradasi yang tidak produktif. Kebakaran yang terjadi di lahan pertanian kelapa sawit dan hutan masing – masing hanya 3 persen dari total keseluruhan area.<sup>3</sup>

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengungkap bahwa kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 juga membakar hutan konservasi. Dari total jumlah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2019, 9 persen yang terbakar hutan lindung dan 10 persen adalah hutan konservasi.<sup>4</sup> Persebaran karhutla di Indonesia tahun 2019 dapat dilihat dari tabel 1.2 :

**Tabel 1.2 Persebaran Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia tahun 2019**

No.	Provinsi	Jumlah kejadian
1.	Kalimantan Tengah	47
2.	Riau	26
3.	Aceh	17
4.	Kalimantan Selatan	17
5.	Kalimantan Timur	9
6.	Sumatera Selatan	8
7.	Jawa Timur	5
8.	Jawa Tengah	4
9.	Jawa Barat	2

<sup>3</sup> “Cifor: 16 Juta Hektare Lahan dan Hutan Indonesia Terbakar di Tahun 2019”, detik.com, 3 Desember 2019, diakses pada 1 september 2020 pukul 20.15 wib. <https://news.detik.com/dw/d-4807590/cifor-16-juta-hektare-lahan-dan-hutan-indonesia-terbakar-di-tahun-2019>

<sup>4</sup> “BNPB Ungkap Kerugian Akibat Karhutla 2019 Capai Rp 75 Triliun”, tirto.id, 30 Desember 2019, diakses pada 8 September 2020 pukul 17.41 wib. <https://tirto.id/bnpb-ungkap-kerugian-akibat-karhutla-2019-capai-rp75-triliun-epRn>

10.	Kalimantan Utara	2
11.	Sulawesi Selatan	2
12.	Sumatera Utara	1
13.	Kalimantan Barat	1

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/persebaran-kebakaran-hutan-dan-lahan-2019#> diakses pada 9 september 2020

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah menjadi luasan kebakaran hutan dan lahan terbesar dengan total lahan terbakar 161.298 hektare dengan 39.634 titik panas. Kalimantan barat sebesar 131.654 hektare lahan terbakar dengan 25.461 titik panas. Kalimantan Selatan total lahan terbakar sebesar 115.317 hektare.<sup>5</sup>

Kasus karhutla di Indonesia tahun 2019 termasuk kasus yang sangat penting bagi pemerintah karena menyangkut berbagai aspek. Salah satu imbas dari karhutla yang terjadi menyebabkan kerugian pada aspek ekonomi. Total kerugian yang ditanggung Indonesia akibat kasus karhutla sepanjang 2019 mencapai 5,2 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 72,95 triliun berdasar data dari World Bank.<sup>6</sup>

Tiga bentuk pemanfaatan kebakaran di Indonesia secara umum, yakni pembukaan dan persiapan lahan, pembebasan lahan, dan sistem pemaksaan penduduk yang bertujuan untuk menyingkir dari lahan tersebut. Pemilik lahan membakar

<sup>5</sup> “Persebaran Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019”, diakses pada 9 September 2020 pukul 17.30 WIB. : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/persebaran-kebakaran-hutan-dan-lahan-2019#>

<sup>6</sup> “Bank Dunia: Kerugian RI Akibat Kebakara Hutan Capai Rp 72,95 Triliun”, Kompas.com, 11 Desember 2019, diakses pada 8 september 2020 pukul 18.10 WIB. [https://money.kompas.com/read/2019/12/11/151500526/bank-dunia-kerugian-ri-akibat-kebakaran-hutan-capai-rp-7295-triliun?page=all#:~:text=Whats%20New-.Bank%20Dunia%3A%20Kerugian%20RI%20akibat%20Kebakaran,Capai%20Rp%2072%2C95%20Triliun&text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Bank,triliun%20\(kurs%20Rp%2014.000\)](https://money.kompas.com/read/2019/12/11/151500526/bank-dunia-kerugian-ri-akibat-kebakaran-hutan-capai-rp-7295-triliun?page=all#:~:text=Whats%20New-.Bank%20Dunia%3A%20Kerugian%20RI%20akibat%20Kebakaran,Capai%20Rp%2072%2C95%20Triliun&text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Bank,triliun%20(kurs%20Rp%2014.000)).

melampaui batas – batas konsesi mereka sebagai pembebasan lahan. Selain itu terjadi pada pihak yang tidak memiliki hak formal terhadap lahan kemudian membakar dan mengklaim lahan tersebut.<sup>7</sup> Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi, Wahyu Perdana, beliau mengungkapkan “dari banyak lembaga negara yang berani menyebutkan bahwa kebakaran sebagian besar pada tahun 2019, di statementnya Kepala BNPB saat itu, Doni Monardo, beliau mengatakan kebakaran terjadi di perkebunan sawit. Karena untuk gambaran ekosistemnya begini, karena kalau kita buka pakai traktor, biayanya bisa sepuluh kali lipat dibanding membakar. Maka sering kali itu terjadi dan sering kali itu dilakukan secara sengaja”(lampiran 1, hal. c). Hingga Desember 2019, ada 416 tersangka dan 25 di antaranya berasal dari perusahaan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan yang ditetapkan oleh polisi.<sup>8</sup> Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak atau korporasi tersebut masih saja sering terjadi walaupun sudah ada undang – undang yang mengatur dalam kasus lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diharapkan dapat mengakomodir pengelolaan dan perlindungan lingkungan dengan baik melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai implementor.

---

<sup>7</sup> Badri Muhammad, dkk, 2018, “Sistem Komunikasi Peringatan Dini Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau”, dalam *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pumbangunan vol. 19 no 1* juni: (Bogor: Institut Pertanian Bogor), hal 1-16.

<sup>8</sup> “Per Desember 2019, Total 25 Perusahaan Jadi Tersangka Karhutla”, Kompas.com, 4 Desember 2019, diakses pada 8 september 2020.

Namun UU Nomor 32 Tahun 2009 belum dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang menyebabkan buruknya implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 adalah faktor komunikasi.<sup>9</sup> Karhutla sebagai masalah ekologi politik dilihat dari kontestasi peran, pengaruh, kepentingan dan relasi kuasa diantara para aktor yang menentukan konfigurasi tata kelola hutan dan lahan. Salah satu aktor penting dalam isu karhutla adalah kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).<sup>10</sup>

Salah satu LSM yang berperan dalam isu kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 di Indonesia yakni Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI). WALHI merupakan organisasi lingkungan hidup yang independen, non-profit dan terbesar di Indonesia yang lebih cenderung melakukan aksi gugatan yang bersifat pluralistik dan independen. Selain itu, kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga WALHI dalam mencapai tujuannya adalah dengan melaksanakan advokasi kebijakan yang meliputi kegiatan: pengorganisasian masyarakat, pendidikan, kampanye, riset, pengorganisasian masyarakat, dialog kebijakan, litigasi, dan menggalang aliansi kekuatan rakyat serta penggalangan dana publik yang nantinya akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk kegiatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan media penyadaran

---

<sup>9</sup> Setiyawan Teguh Imam, 2017, “Analisis Komunikasi Implementasi UU nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Hidup ( Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Kabupaten Pelalawann)”, dalam *Jurnal Of Politic and Government Studies* vol. 6 no 3 juli: (Semarang: Universitas Diponegoro), hal 1

<sup>10</sup> Adrhian David, 2016, “Dinamika Peran dan Strategi LSM Dalam Arena Politik Lingkungan Hidup (Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan)”, (Bogor: Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor), hal 17

masyarakat akan lingkungan yang bersih dan sehat untuk mewujudkan masyarakat ramah lingkungan.<sup>11</sup>

Ketidaksetujuan WALHI atas apa yang dilakukan pemerintah yang berdampak pada lingkungan seperti kebebasan dalam berinvestasi guna meningkatkan perekonomian tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada lingkungan. Misalnya, kebijakan ekonomi yang tetap bertopang pada investasi industri ekstraktif menjadi pilihan utama atas kebijakan ekonomi dan pembangunan Indonesia, setidaknya dalam lima tahun ke depan. Upaya penyangkalan yang dilakukan oleh elit politik, termasuk Presiden atas krisis lingkungan hidup yang terjadi. Pernyataan Presiden dalam pidatonya yang mengatakan bahwa kampanye perkebunan sawit Indonesia yang merusak lingkungan hidup, terkait dengan soal persaingan perdagangan antar negara.<sup>12</sup> Pernyataan Presiden ini menutup mata dan menyangkal atas praktik buruk perkebunan sawit yang selama ini merusak lingkungan hidup, melanggar hak asasi manusia dan bahkan menimbulkan krisis iklim yang dampaknya kini semakin berat ditanggung oleh rakyat.

Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem WALHI Nasional, Wahyu A. Perdana menanggapi ungkapan Presiden Joko Widodo mengenai keingiannya untuk semua Kementerian dan Lembaga Negara untuk fokus pada penerimaan serta tidak menghambat investasi. Menurut Wahyu, Presiden Joko Widodo terlalu memberikan

---

<sup>11</sup> walhi.or.id, “*Sejarah Walhi*”, diakses pada 12 september 2020 pukul 19.37 wib.

<sup>12</sup> Sembiring, Boy Jerry Even. dkk, 2020, “*Tinjauan Lingkungan Hidup 2020: Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi*”, (Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), laporan tahunan walhi.or.id, diakses pada 24 oktober 2020 pukul 20.19 WIB, hal 42.

kebebasan dalam berinvestasi tanpa memikirkan dampak yang terjadi seperti karhutla yang semakin parah. Dibanding memberikan tambahan keistimewaan bagi korporasi, Presiden Joko Widodo seharusnya lebih meninjau kembali izin konsesi, mengaudit lingkungan, dan mengevaluasi kelembagaan pada Kementerian dan Lembaga yang bertanggung jawab.<sup>13</sup> Pemerintah bersama parlemen dirasa lebih mengutamakan banyak rancangan kebijakan yang mengistimewakan korporasi dan mengancam hak masyarakat daripada mematuhi keputusan MA untuk membuka data konsesi dan membangun rumah sakit khusus korban asap dari dampak karhutla. Dari persoalan tersebut WALHI berperan dalam merespon isu ini melalui komunikasi politik kepada pemerintah, guna untuk menjamin hak-hak rakyat atas berbagai sumber kehidupan dan lingkungan hidup. Bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh WALHI berupa *press release*, kampanye, gugatan langsung kepada pemerintah, buku dan *e-newsletter* melalui website WALHI.

Komunikasi Politik (*Political Communication*) yang dimaksud adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Sehingga proses komunikasi politik yang dilakukan oleh WALHI bertujuan sebagai jembatan antara pemerintah kepada masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal

---

<sup>13</sup> "Walhi Sebut Jokowi Selalu Bahas Investasi, Tapi Lupa Karhutla", *tirto.id*, 14 September 2020 diakses pada 24 oktober 2020 pukul 21.20 WIB. <https://tirto.id/walhi-sebut-jokowi-selalu-bahas-investasi-tapi-lupa-karhutla-eh39>

dalam suatu wilayah tertentu.<sup>14</sup>. Berbagai aksi atau tindakan yang dilakukan WALHI dalam merespon isu karhutla dikomunikasikan juga melalui *e-newsletter*.

Edisi pertama *e-newsletter* WALHI terbit pada tahun 2013. Sejauh ini sudah ada kurang lebih sekitar sebelas *e-newsletter* yang sudah diterbitkan melalui website resmi WALHI. Berikut beberapa terbitan *e-newsletter*:

**Tabel 1.3 Edisi E-newsletter WALHI**

No.	Edisi/volume	Judul
1.	Edisi 1	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
2.	Vol. 3 (Januari 2019)	Kerusakan Lahan Gambut
3.	Vol.1 (November 2019)	Jangan Hapus AMDAL dan IMB
4.	Vol.1 (desember 2019)	Hak Atas Lingkungan Hidup = Hak Asasi Manusia
5.	Vol. 2 (desember 2019)	Kekerasan dan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan
6.	Vol. 3 (Desember 2019)	Ibukota Baru Buat Siapa
7.	Vol. 4 (Desember 2019)	Negara – Negara Maju Masih Tidak Berpihak Pada Upaya Perubahan Iklim
8.	Vol.1 (januari 2020)	Peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup 2020 WALHI
9.	Vol.2 (Januari 2020)	Pelajar, Mahasiswa dan Pecinta Satwa Tolak RUU Omnibus Law
10.	Vol.3 (Februari 2020)	Tambang di Banyuwangi
11.	Vol. 1 (Maret 2020)	Menuju PNLH XIII / Debat Calon Fungsionaris Eksekutif Nasional WALHI 2020-2024
12.	Vol. 1.1 (Maret 2020)	Adu Gagasan Untuk WALHI 2020-2024
13.	Vol. 2 (maret 2020)	Musim Hujan Banjir, Musim Kemarau Polusi Itu DKI
14.	Vol. 1(april 2020)	Polisi Backing Perusahaan Sawit Ditengah Pandemi Covid-19, 2 Petani Sumsel Tewas
15.	Vol.1 (Februari 2021)	Peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2021
16.	Vol.2 (Februari 2021)	Pemerintah Segera Evaluasi Dan Cabut Izin Industri Ekstraktif Bermasalah

<sup>14</sup> Ibid, hal 28.

17.	Vol.3 (Februari 2021)	Food Estate: Benarkah Atas Nama Pemenuhan Hak Pangan? KLHS Bukan Stempel Proyek Food Estate
-----	-----------------------	---

Sumber: <https://www.walhi.or.id/category/e-newsletter> diakses pada 21 Maret 2021

Berdasarkan uraian diatas, ada enam artikel yang berkaitan dengan isu karhutla di Indonesia yakni pada edisi bulan Januari 2019 volume 3, November 2019 volume 1, Desember 2019 volume 2, Januari 2020 volume 1, februari 2021 volume 2, dan februari 2021 volume 3. Peneliti ingin melihat pesan atau komunikasi politik seperti apa yang dilakukan WALHI dalam menyuarakan isu karhutla yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2019 kepada publik.

Peneliti menggunakan media *e-newsletter* karena WALHI telah merangkul berbagai kegiatan atau aksi yang telah dilakukan melalui media tersebut sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Seperti yang telah diketahui bahwa *e-newsletter* merupakan salah satu dari sosial media atau tools yang memiliki kelebihan daripada *newsletter* seperti kecepatan, efisiensi, dan ketepatan yang terjadi pada saat menggunakan *e-newsletter*.<sup>15</sup>

Tahun yang peneliti pilih adalah tahun 2019 karena sejak karhutla di Indonesia tahun 2015, beberapa tahun berikutnya sudah mengalami penurunan jumlah kasus karhutla yang cukup signifikan hingga tahun 2018. Namun pada tahun 2019 jumlah luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia melonjak kembali. Selain itu dirasa kalau mengambil tahun 2015 terkesan tidak *up to date*. Selain itu fokus yang ingin digali

---

<sup>15</sup> Soegiharto, Sherly Valencia, 2017, “Sikap Karyawan X di Bali Mengenai Isi Media Internal E-newsletter”, dalam junal e-komunikasi vol 5 no.1: (Surabaya: Universitas Kristen Petra) hal 7.

disini bukan karena besarnya kasus yang ada, tapi tentang bagaimana peran WALHI dalam mengkomunikasikan tentang isu karhutla di Indonesia melalui *e-newsletter*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana komunikasi politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melalui *e-newsletter* dalam respon isu kebakaran hutan dan lahan Indonesia tahun 2019?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi politik yang dilakukan oleh WALHI melalui *e-newsletter* dalam respon isu kebakaran hutan dan lahan Indonesia tahun 2019.

## 1.4 Manfaat

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya mengenai cara komunikasi politik tentang isu karhutla di Indonesia yang dilakukan oleh WALHI.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi masyarakat

Diharapkan mampu mengetahui komunikasi politik yang dilakukan oleh WALHI kepada masyarakat yang terkena dampak dari kebakaran hutan dan lahan tahun 2019.

#### 2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap penerapan kebijakan tentang Lingkungan khususnya Karhutla di Indonesia.

